ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PROVINSI PAPUA BARAT

(SKRIPSI)

Oleh
EXAUDI MEXCHAEL TUA PANGGABEAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017

ABSTRACT

THE ANALYSIS OF INFLUENCE OF SPECIAL AUTONOMY FUND AGAINST HUMAN DEVELOPMENT INDEX WITH CAPITAL EXPENDITURE AS INTERVENING VARIABLE IN WEST PAPUA PROVINCE

by
Exaudi Mexchael Tua Panggabean

This study aims to analyze the effect of receiving special autonomy fund on human development index in West Papua Province with capital expenditure as intervening variable. As an independent variable, the special autonomy fund is measured by the budget ratio and its realization, capital expenditure is measured by the ratio of total capital expenditure to total local expenditure. Human Development Index as a dependent variable is measured by using a score that has been done by the Central Bureau of Statistics (Badan Pusat Statistik). After performing regression analysis with common effect model (CEM) method of panel data from 13 city and districts in West Papua during 2012 - 2015, the test result shows that special autonomy fund has positive and significant effect to capital expenditure, while special autonomy fund has no positive effect to human development index with capital expenditure as intervening variable

Keywords: Special autonomy fund, human development index, capital expenditure, intervening.

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PROVINSI PAPUA BARAT

Exaudi Mexchael Tua Panggabean

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerimaan dana otonomi khusus terhadap indeks pembangunan manusia pada Provinsi Papua Barat dengan belanja modal sebagai variabel intervening. Sebagai variabel independen, dana otonomi khusus diukur dengan rasio anggaran dan realisasinya, belanja modal diukur dengan rasio total belanja modal dengan total belanja daerah. Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel dependen diukur dengan menggunakan skor yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Setelah melakukan analisis regresi dengan metode *common effect model (CEM)* atas data panel dari 13 kota dan kabupaten di Papua Barat selama tahun 2012 – 2015, hasil pengujian menunjukkan bahwa dana otonomi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, sedangkan dana otonomi khusus tidak berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia dengan belanja modal sebagai variabel intervening.

Kata Kunci: Dana otonomi khusus, indeks pembangunan manusia, belanja modal, intervening.

ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PROVINSI PAPUA BARAT

Oleh
EXAUDI MEXCHAEL TUA PANGGABEAN

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA EKONOMI

Pada
Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI
2017

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PROVINSI PAPUA BARAT**

Nama Mahasiswa : *Exaudi Mexchael Tua Panggabean*

Nomor Pokok Mahasiswa : 1511031161

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.	**Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si.**
NIP 19710802 199512 2 001	NIP 19801017 200512 2 002

2. Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19620612 199010 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt** .....

Sekretaris : **Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si.** .....

Penguji Utama : **Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt., C.A.** .....

2. Dekan Fakultas Ekonomi

Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP 19610904 198703 1 011

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **16 Januari 2018**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul "Analisis Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening pada Provinsi Papua Barat" adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan saya ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 Februari 2018
Penulis,

METERAI TEMPEL
F2085AEF681590947
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Exaudi Mexchael Tua Panggabean
NPM 1511031161

RIWAYAT HIDUP

Exaudi Mexchael Tua Panggabean lahir di Pematang Siantar pada tanggal 3 Mei 1988 dari pasangan Bapak P. Panggabean dan Ibu P.Sitorus, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Yonaha pada tahun 1994. Dilanjutkan dengan pendidikan dasar di SD RK Budi Mulia 2 dan lulus pada tahun 2000. Kemudian, penulis menyelesaikan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Pematang Siantar yang diselesaikan pada tahun 2003, lalu dilanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas di SMA N 1 Matauli Pandan hingga lulus pada tahun 2006. Penulis melanjutkan pendidikan Diploma III Spesialisasi Administrasi Perpajakan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang diselesaikan pada tahun 2011. Pada tahun 2012 penulis merintis karir sebagai auditor pelaksana di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Barat, hingga akhirnya pada tahun 2015 mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan sarjana di Jurusan Akuntansi Fakultas Eknomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui program *State Accountability Revitalization Project* (STAR) yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan *Asian Development Bank* (ADB).

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala

nikmat dan rahmat yang diberikan,

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Ibunda, P. Sitorus

Ayahanda, P.Panggabean

Teman-teman STAR BPKP Batch 2 UNILA

Almamaterku, Universitas Lampung

Institusiku, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

MOTTO

"Say what you need to say. It's better to say too much than never to say what you need to say again", John Mayer.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan petunjuk-Nya skripsi berjudul "Analisis Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening pada Provinsi Papua Barat" dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini memiliki kelemahan dan kekurangan karena keterbatasan yang dimiliki penulis. Namun berkat adanya arahan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak maka skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt., sebagai Dosen Pembimbing I. Terima kasih atas segala motivasi, bimbingan, dan masukan yang diberikan selama proses penyelesaian skripsi.
4. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan juga sebagai Dosen

Pembimbing II. Terima kasih atas segala motivasi, bimbingan, dan masukan yang diberikan selama proses penyelesaian skripsi.

5. Ibu Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt., C.A., selaku Dosen Penguji. Terima kasih atas segala motivasi, bimbingan, dan masukan yang diberikan guna penyempurnaan skripsi.
6. Ibu Agustina Awan, Bapak Noveriadi, Bapak Sulaiman, Bapak Yogi, Mbak Diana beserta seluruh dosen, karyawan, dan civitas akademika di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, terima kasih atas segala pelayanan dan bantuan yang diberikan.
7. Ibunda P.Sitorus, Ayahanda, P. Panggabean, Adinda Januardo Panggabean dan Septrimen Panggabean, terima kasih atas doa, cinta, kasih sayang, pengorbanan, kesabaran, dan perjuangan dalam membesarkan penulis.
8. Seluruh rekan-rekan STAR BPKP Batch II Universitas Lampung, terima kasih atas kebersamaan yang diberikan selama dua tahun ini.
9. Seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang telah diberikan dan skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, Februari 2018

Penulis,

Exaudi Mexchael Tua Panggabean

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL i
ABSTRACT ii
ABSTRAK iii
HALAMAN JUDUL iv
HALAMAN PERSETUJUAN v
HALAMAN PENGESAHAN vi
LEMBAR PERNYATAAN vii
RIWAYAT HIDUP viii
PERSEMBAHAN ix
MOTTO x
SANWACANA xi
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR TABEL xvii
DAFTAR GAMBAR xviii
DAFTAR LAMPIRAN xix
I . PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 9
1.3 Tujuan Penelitian 9
1.4 Manfaat Penelitian 9
II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 11
2.1 Kajian Pustaka 11
2.1.1 Teori Desentralisasi 11
2.1.2 Pendapatan Transfer 13
2.1.3 Dana Otonomi Khusus 15
2.1.4 Belanja Modal 16
2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia 16
2.2 Penelitian Terdahulu 18

2.3 Kerangka Pemikiran 20
2.4 Pengembangan Hipotesis.....21
2.4.1 Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap IPM 21
2.4.2 Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Modal ...21
2.4.3 Pengaruh Belanja Modal Terhadap IPM 22
2.4.4 Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap IPM Melalui Belanja Modal 22
III. METODE PENELITIAN 23
3.1 Jenis Penelitian.....23
3.2 Jenis dan Sumber Data 23
3.3 Populasi dan Sampel 24
3.4 Model Penelitian 24
3.5 Definisi Operasional Variabel.....25
3.5.1 Variabel Dependen 25
3.5.2 Variabel Independen 26
3.5.3 Variabel Intervening.....26
3.6 Teknik Analisis Data.....27
3.6.1 Pendekatan Model Regresi Data Panel 27
3.6.2 Pemilihan Model 28
3.7 Analisis Data 30
3.7.1 Analisis Deskriptif.....30
3.7.2 Uji Asumsi Klasik 31
3.8 Analisis Regresi (Uji Hipotesis).....34
3.8.1 Uji Variabel Intervening.....35
3.8.2 Koefisien Determinasi (R^2) 36
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....37
4.1 Statistik Deskriptif 37
4.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 37
4.1.2 Dana Otonomi Khusus 38
4.1.3 Belanja Modal 39
4.2 Pemilihan Model 39
4.3 Uji Asumsi Klasik 42

4.4 Analisis Hasil Regresi Data Panel 45
4.4.1 Hasil Regresi Substruktur I 45
4.4.2 Hasil Regresi Substruktur II 46
4.4.3 Hasil Regresi Substruktur III.....47
4.5 Uji Variabel Intervening 48
4.6 Pembahasan 49
4.6.1 Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap IPM 55
4.6.2 Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Modal ...56
4.6.3 Pengaruh Belanja Modal Terhadap IPM 56
4.6.4 Pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap IPM dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening 57
V. SIMPULAN DAN SARAN.....59
5.1 Simpulan 59
5.2 Implikasi.....62
5.3 Keterbatasan Penelitian 62
5.4 Saran.....62
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	18
Tabel 2.1	Pengelompokan Indeks EKPPD dan Status Prestasi	18
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu	26
Tabel 4.1	Statistik Deskriptif	37
Tabel 4.2	Hasil Pengujian *Likelihood Ratio Test*	40
Tabel 4.3	Hasil Pengujian *Hausman Test*	40
Tabel 4.4	Hasil Uji *Lagrange Multiplier (LM)*	41
Tabel 4.5	Hasil Uji Normalitas	42
Tabel 4.6	Hasil Uji Multikolinearitas	43
Tabel 4.7	Hasil Uji Heterokedastisitas dengan *Glejser Test*	44
Tabel 4.8	*Estimation Output* Hasil Regresi Substruktur I	45
Tabel 4.9	*Estimation Output* Hasil Regresi Substruktur II	46
Tabel 4.10	*Estimation Output* Hasil Regresi Substruktur III	47
Tabel 4.11	Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen	50
Tabel 4.12	Penerimaan/Penolakan Hipotesis	50
Tabel 4.13	Belanja Dana Otonomi Khusus Kota Sorong Tahun 2014	51
Tabel 4.14	Belanja Dana Otonomi Khusus Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2014	52
Tabel 4.15	Belanja Dana Otonomi Khusus Kabupaten Maybrat Tahun 2014	52

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Grafik Alokasi Dana Otonomi khusus Papua Barat Tahun 2009 – 2016 5
Gambar 1.2 Grafik IPM Papua Barat Tahun 2009-2015 7
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran..... 20
Gambar 4.1 Uji Variabel Intervening 48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:

1. Data Variabel Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dimana terdapat lebih dari ratusan suku bangsa yang mendiami pulau-pulau tersebut. Pengalaman pada pemerintahan orde baru dimana pemerintah pada saat itu menggunakan sistem sentralisasi mengakibatkan hampir seluruh daerah di luar Pulau Jawa mengalami ketertinggalan. Hal ini disebabkan oleh setiap kebijakan yang berkaitan dengan seluruh daerah yang ada di Indonesia ditentukan oleh Pemerintah Pusat sehingga mengakibatkan kesenjangan pembangunan diseluruh bidang diantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berkaca dengan pengalaman ini, maka sistem sentralisasi tidak berlaku lagi sejak era reformasi digantikan dengan sistem otonomi daerah. Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).

Otonomi daerah dapat diartikan dengan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Dengan diberlakukannya otonomi daerah ini, pemerintah daerah diharapkan dapat memiliki kemauan dan kemampuan yang kuat untuk memajukan daerahnya.

Seiring dengan berjalannya waktu, penerapan otonomi daerah ternyata tidak cukup untuk memenuhi setiap kebutuhan beberapa pemerintah daerah untuk memajukan daerahnya. Pemerintah pusat merasa perlu diberlakukan suatu sistem selain otonomi daerah sebagai solusi untuk daerah-daerah tersebut. Sebagai jawaban atas permasalahan ini, maka diberlakukanlah otonomi khusus bagi Pemerintah Provinsi Papua melalui Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001, Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, dan terakhir bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008.

Kesejahteraan dan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia dalam hal ini juga dapat dipahami dalam hal pemberian anggaran dana bagi setiap daerah secara adil dan merata sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah, sehingga setiap daerah dapat mewujudkan kesejahteraan bagi setiap masyarakatnya. Tjandra (2006) menyebutkan bahwa salah satu tujuan pokok negara

kesejahteraan yaitu menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata. Dalam hal ini, Asshiddiqie (2007) menegaskan dalam bukunya, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat disebut sebagai Konstitusi Keadilan Sosial (*Social Justice Constitution*), sehingga semua norma yang tercermin dalam pelbagai kebijakan dan peraturan perundang- undangan dan semua tindakan pemerintahan yang tercermin dalam program pembangunan disertai anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah masing-masing, hendaklah diorientasikan untuk meningkatkan kualitas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Guna mencapai kesejahteraan dan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, perlu diberikannya tambahan dana bagi daerah-daerah yang diberikan kebijakan khusus. Dana tambahan tersebut disebut dengan Dana Otonomi Khusus. Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana Otonomi Khusus tersebut terutama ditujukan ditetapkan antara Pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Alokasi dana otonomi khusus ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional yang berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun dan dana Tambahan Infrastruktur.

Mulai tahun ke-26 (dua puluh enam), alokasi dana otonomi khusus menjadi 50% (lima puluh persen) untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk pertambangan gas alam. Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus mulai tahun ke-26 (dua puluh enam) ini berlaku selama 20 (dua puluh tahun). Alokasi dana otonomi khusus dari pemerintah pusat kepada Provinsi Papua diatur secara adil dan berimbang antara Provinsi Papua, Kabupaten, Kota atau dengan Peraturan Daerah Khusus (perdasus), dengan memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah yang tertinggal. Penerimaan dana otonomi khusus sekurang-kurangnya dialokasikan sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk biaya pendidikan dan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) untuk kesehatan dan perbaikan gizi.

Pada tahun 2008 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 sebagai dasar hukum pemberian dana Otonomi Khusus kepada Provinsi Papua Barat yang megalami pemekaran pada tahun 2007. Mekanisme pengalokasian dana Otonomi Khusus mengalami perubahan setelah pemekaran ini. Dana alokasi khusus sebesar 2% (dua persen) dari Dana Alokasi Umum Nasional yang sebelumnya diberikan penuh kepada Provinsi Papua, dialokasikan menjadi 70% (tujuh puluh persen) dari dana tersebut kepada Provinsi Papua dan sebesar 30% (tiga puluh persen) dialokasikan kepada Provinsi Papua Barat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, pembagian dana otonomi khusus antara Provinsi Papua Barat, Kota, Kabupaten, atau nama lain diatur secara adil dan berimbang dengan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus). Namun pada kenyataannya sampai saat ini, Gubernur dan DPRD Provinsi Papua Barat belum pernah sekalipun menerbitkan Perdasus mengenai pembagian dana

otonomi khusus. Hal ini dirasa sangat ironis mengingat dana Otonomi Khusus telah diberikan kepada Provinsi Papua Barat kurang lebih selama 10 tahun sejak provinsi ini mengalami pemekaran. Pemerintah pusat juga belum atau tidak pernah melakukan teguran kepada Provinsi Papua Barat berkaitan dengan hal ini. Penulis mengkhawatirkan akan terjadi permasalahan baru mengenai hal ini karena pembagian dana otonomi khusus antara Provinsi Papua Barat, Kota, Kabupaten, atau nama lain tidak berdasarkan dasar hukum yang kuat.

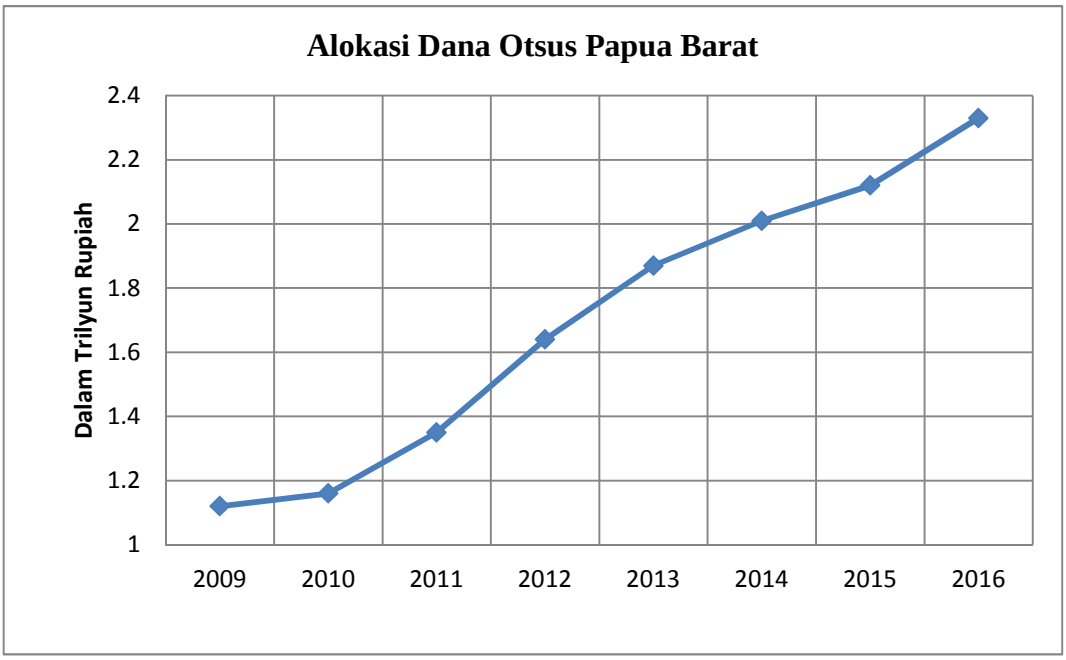

Gambar 1.1
Grafik Alokasi Dana Otonomi khusus Papua Barat Tahun 2009 – 2016
Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (data diolah)

Peningkatan penerimaan dana otonomi khusus sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 yang diterima oleh Provinsi Papua Barat dengan jumlah yang besar diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di Papua Barat. Dengan anggaran dana otonomi khusus yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, maka pertumbuhan di sektor pendidikan, sektor kesehatan dan perbaikan

infrastruktur akan semakin meningkat pula. Sehubungan dengan besarnya dana yang terima oleh kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat dan telah dianggarkan dalam belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan untuk pengadaan infrastruktur publik membuktikan bahwa *theory of grants* memberikan landasan bahwa bantuan pemerintah (yang dalam praktiknya di Indonesia dapat berbentuk transfer dana) menjadi stimulus bagi kemajuan ekonomi daerah dan menambah tingkat daya beli masyarakat. Tambahan kemampuan ini pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Hartati, dkk, 2016).

Selanjutnya dapat dilihat dari penelitian Hong dan Ahmed (2009) terhadap 14 negara bagian di India yang menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah melalui belanja publik seperti untuk kesehatan, pendidikan dan infrastruktur (belanja modal) berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan Adi (2006) dengan sampel Kabupaten/Kota se Jawa dan Bali yang menyimpulkan bahwa belanja pembangunan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah dalam bentuk alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Melalui peningkatan belanja modal APBD tersebut diharapkan menjadi faktor pendorong timbulnya berbagai investasi baru di daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk kegiatan produksi sehingga pada akhirnya dapat

meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat diwujudkan melalui penyediaan sarana publik yang baik, peningkatan kesejahteraan masyatakat yang diwujudkan melalui penyediaan sarana publik tersebut pada akhirnya akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Sumardjoko, 2014).

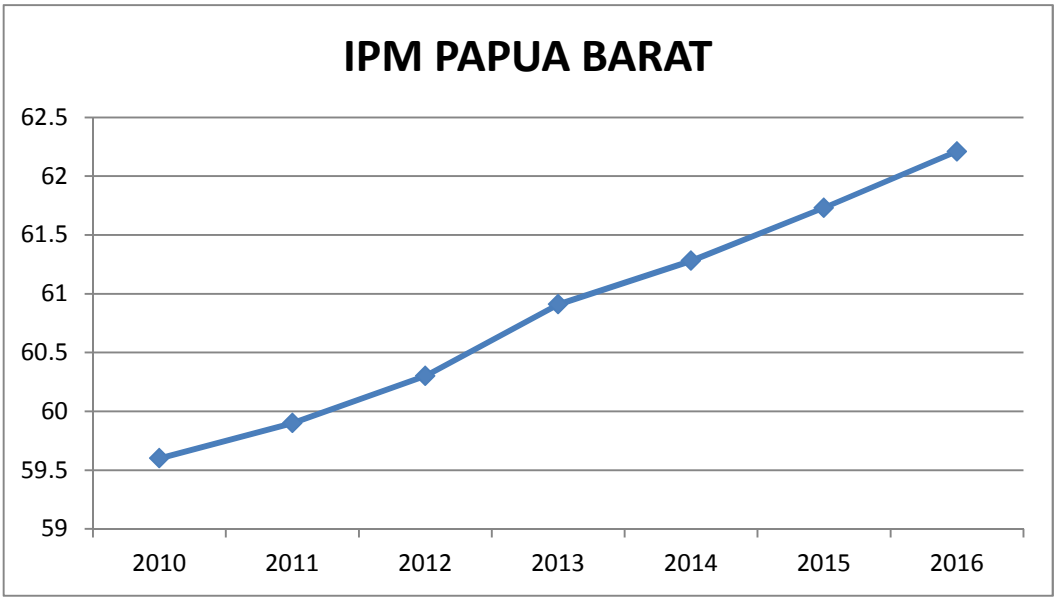

Gambar 1.2

Grafik IPM Papua Barat Tahun 2009-2015

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

Terdapat fenomena yang menarik dari data-data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menggambarkan terjadinya peningkatan IPM di Provinsi Papua Barat setiap tahunnya. Dana otonomi khusus yang diterima oleh Papua Barat mengalami peningkatan di setiap tahunnya, sementara disisi lain fenomena perkembangan IPM juga mengalami peningkatan.

Walaupun perkembangan IPM yang meningkat dari tahun ke tahun, akan tetapi tambahan dana otonomi khusus memiliki pengaruh yang yang tidak signifikan

terhadap peningkatan IPM dan penurunan tingkat kemiskinan di Papua (Jerat Papua, https://www.jeratpapua.org/2014/08/27/kemana-larinya-dana-otonomi khusus-papua/, diakses tanggal 6 September 2017). Dana otonomi khusus untuk Kota Sorong pada tahun 2015 tidak mengalami peningkatan, akan tetapi mengalami penurunan sementara IPM Kota Sorong naik sebesar 7,6% (Radar Sorong, http://www.radarsorong.com/read/2015/07/11/38636/IPM-di-Kota-Sorong-Naik-76-Persen, diakses tanggal 6 September 2017. Penelitian oleh Warouw dkk (2016) menyatakan bahwa dana otonomi khusus Kota Sorong peruntukannya telah terealisasi secara penuh dan tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaannya, akan tetapi masyarakat Kota Sorong menyatakan bahwa dana otonomi khusus dirasa masih kurang jika dibandingkan dengan banyaknya tuntutan/keinginan masyarakat unttuk melaksanakan pembangunan didaerah ini. Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Laimeheriwa (2013) menyatakan bahwa dana otonomi khsusus tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Fenomena ini sangat menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut sehingga penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul ”**Analisis Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening pada Provinsi Papua Barat**” dengan studi empiris pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Papua Barat dalam rentang waktu 2012-2015.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka pertanyaan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah dana otonomi khusus berpengaruh terhadap pertumbuhan IPM?
2. Apakah dana otonomi khusus berpengaruh terhadap belanja modal?
3. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan IPM?
4. Apakah dana otonomi khusus berpengaruh terhadap pertumbuhan IPM dengan belanja modal sebagai mediatornya?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan dana otonomi khusus berpengaruh terhadap pertumbuhan IPM.
2. Untuk membuktikan dana otonomi khusus berpengaruh terhadap belanja modal.
3. Untuk membuktikan belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan IPM.
4. Untuk membuktikan dana otonomi khusus berpengaruh terhadap pertumbuhan IPM dengan belanja modal sebagai mediatornya.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian-

penelitian terdahulu mengenai kajian atas pengaruh dana otonomi khusus dan belanja modal terhadap pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dan tambahan informasi bagi pemerintah khususnya pemerintah kota/kabupaten di Provinsi Papua Barat tentang pengaruh penganggaran dana otonomi khusus dan belanja modal terhadap pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia di daerahnya sehingga penggunaan dana otonomi khusus dapat dipergunakan secara maksimal untuk peningkatan kualitas pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 KAJIAN PUSTAKA

2.1.1 TEORI DESENTRALISASI

Maddick (1963) menjelaskan bahwa desentralisasi ialah penyerahan kekuasaan secara hukum untuk dapat menangani bidang-bidang atau fungsi-fungsi tertentu kepada daerah otonom. Menurut Rondinelli (1983), desentralisasi ialah penciptaan atau penguatan, baik itu dari segi keuangan maupun hukum, kepada unit-unit pemerintahan subnasional yang penyelenggaraannya secara bersifat substansial berada diluar kontrol langsung dari pemerintah pusat.

Rondinelli (1983) membedakan bentuk desentralisasi seperti berikut:

1. *Deconsentration* ialah penyelenggaraan urusan pemerintah pusat kepada daerah melalui wakil perangkat pusat yang ada di daerah.
2. *Delegation to semi-outonomous and parastatal organizations* ialah suatu pelimpahan kewenangan didalam pembuatan suatu keputusan dan juga manajerial didalam melaksanakan tugas-tugas khusus pada suatu organisasi yang tidak langsung berada pada pengawasan pemerintah pusat.

3. *Devolution to local government* ialah penjelmaan dari desentralisasi yang dalam arti luas, yang berakibat bahwa pemerintah pusat harus dapat membentuk unit-unit pemerintahan di luar pemerintah pusat, dengan menyerahkan fungsi dan juga kewenangan untuk dapat dilaksanakan secara sendiri yang disebut dengan desentralisasi teritorial.
4. *Delegation to Non-government institutions* (penyerahan atau transfer fungsi dari pemerintah kepeda organisasi atau institusi non pemerintah). Dengan sebutan lain ialah sebagai Privatisasi, ialah suatu bentuk pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada badan-badan sukarela, swasta, LSM atau NGO's, namun juga ialah penyatuan badan-badan milik pemerintah yang kemudian di swastakan seperti, BUMN dan juga BUMD dileburkan menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Siddik (2002) menulis, desentralisasi merupakan sebuah instrumen untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Dengan desentralisasi, akan diwujudkan dalam pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (*taxing power*), terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat, kepala daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah Pusat.

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu bentuk dan komponen utama dalam desentralisasi. Kebijakan desentralisasi fiskal banyak dipergunakan negara-negara sedang berkembang untuk menghindari ketidak efektifan dan ketidak efisienan

pemerintahan, ketidak stabilan ekonomi makro, dan ketidakcukupan pertumbuhan ekonomi (Bahl dan Linn, 1992:384).

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Pemberian sumber keuangan negara berdasarkan PMK Nomor 06/PMK.07/2012 diistilahkan dengan dana Transfer ke Daerah yaitu bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan dana penyesuaian.

2.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

Menurut UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 3, perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggara Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah tersebut adalah berupa transfer dana dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer ke daerah adalah dana yang dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan

antar daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah. Dalam kebijakan Transfer ke Daerah, terdapat 4 alokasi dana, yaitu:

1. Dana Perimbangan, merupakan dana yang bersumber dari pendapatan dalam APBN yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Komponen pembentuk dana perimbangan ada tiga, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
2. Dana Otonomi Khusus, merupakan dana yang diberikan kepada daerah-daerah yang menjalankan otonomi khusus, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh.
3. Dana Daerah Keistimewaan Yogyakarta, adalah dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Dana Transfer Lainnya, merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah untuk melaksanakan kebijakan tertentu berdasarkan Undang – Undang seperti Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi, dan Dana Insentif Daerah.

Julitawati (2012) menjelaskan bahwa semakin besar transfer dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya, sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah menurun.

2.1.3 DANA OTONOMI KHUSUS

Otonomi Khusus mulai diberlakukan di Provinsi Papua pada tahun 2002 berdasarkan UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, kemudian untuk Provinsi Papua Barat pemberlakuan otonomi khusus diberikan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang. Disamping itu, dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat juga dialokasikan dana tambahan infrastruktur. Besaran dana tambahan infrastruktur ini disepakati antara Pemerintah dengan DPR, dan penggunaannya diutamakan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur.

Provinsi Papua dan Papua Barat adalah daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, namun masyarakatnya mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Ketertinggalan perekonomian masyarakat, minimnya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, jaringan infrastruktur yang masih memprihatinkan, hingga persoalan rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) merupakan permasalahan mendasar di wilayah ini. Oleh karena itu, untuk memperkecil ketertinggalan dengan daerah lain, maka pemerintah memberikan dana otonomi khusus kepada Provinsi Papua dan Papua Barat. Pemberian dana otonomi khusus ini didasarkan pada nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia.

2.1.4 BELANJA MODAL

Pengertian belanja modal menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Permendagri 13 Tahun 2006 mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Zasriati (2015) menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi berdampak terhadap jumlah alokasi belanja modal. Indeks pembangunan manusia dicerminkan oleh pembangunan berbagai macam sarana prasarana dan infrastruktur guna meningkatkan taraf kualitas fisik dan non fisik masyarakat serta tingkat kesejahteraan masyarakat baik dari aspek pendidikan, kesehatan dan kebutuhan akan ketersediaan perumahan yang layak.

2.1.5 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Pengertian Indeks Pembangunan Manusia menurut *United Nations Development Programme* adalah *a summary measure of average achievement in key dimensions of human development: a long and healthy life, being knowledgeable*

and have a decent standard of living. The HDI is the geometric mean of normalized indices for each of the three dimensions.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Menurut Todaro (2006:187) pembangunan manusia ada tiga komponen universal sebagai tujuan utama meliputi:

a. Kecukupan, yaitu merupakan kebutuhan dasar manusia secara fisik. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi akan menghentikan kehidupan seseorang, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan keamanan. Jika satu saja tidak terpenuhi akan menyebabkan keterbelakangan absolut.
b. Jati diri, yaitu merupakan komponen dari kehidupan yang serba lebih baik adalah adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri, untuk merasa diri pantas dan layak mengejar sesuatu, dan seterusnya. Semuanya itu terangkum dalam self esteem (jati diri).
c. Kebebasan dari sikap menghamba, yaitu merupakan kemampuan untuk memiliki nilai universal yang tercantum dalam pembangunan manusia adalah kemerdekaan manusia. Kemerdekaan dan kebebasan di sini diartikan sebagai kemampuan berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran dari aspek-aspek materil dalam kehidupan. Dengan adanya kebebasan kita tidak hanya semata-mata dipilih tapi kitalah yang memilih.

Indeks Pembangunan Manusia dapat dihitung dengan cara setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM.

2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Kesimpulan
1.	Zasriati (2015)	Analisis Pengaruh Belanja Modal Terhadap IPM dan Pertumbuhan Ekonomi di Pemerintah Provinsi Jambi	Variabel Independen: Belanja Modal Variabel Dependen: IPM, Pertumbuhan Ekonomi	Belanja modal berpengaruh secara signifikan terhdap IPM di Pemerintah Provinsi Jambi. Belanja modal berpengaruh secara signifikan terhdap pertumbuhan ekonomi di Pemerintah Provinsi Jambi.
2.	Laimeheriwa (2013)	Analisis pengaruh penerimaan dana Otonomi Khusus, DAU terhadap belanja modal dan IPM (Studi pada kota dan	Variabel Independen: Dana Otonomi khusus, DAU Variabel Dependen: Belanja	Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal namun dana otonomi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Dana otonomi khusus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Dana otonomi khusus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM melalui belanja modal

		kabupaten di Provinsi Papua)	Modal, IPM	
3.	Hartati, dkk (2016)	Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus Dan Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Pada Indeks Pembangun an Manusia Kabupaten/ Kota Di Aceh	Variabel Independen: Dana Otonomi Khusus, TDBH Migas Variabel Dependen: Belanja modal, IPM	Dana otonomi khusus dan TDBH Migas berpengaruh positif baik secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap belanja modal kabupaten/kota di Aceh.
4.	Kusumast uti (2012)	Analisis Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Pertumbuha n Ekonomi dan dampaknya pada IPM di Wilayah Tapal Kuda Jawa Timur	Variabel Independen: PAD, DAU, DAK Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi	PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tapal kuda Jawa Timur.
5.	M. Hijrah Saputra (2014)	Pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap IPM	Variabel Independen: Dana otonomi	Dana otonomi khusus mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap IPM, dimana peningkatan dana otonomi khusus beriringan dengan peningkatan

		Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh	khusus Variabel Dependen: IPM	IPM.
6.	Shinta Warouw, dkk (2016)	Analisis Penggunaan Dana Otonomi Khusus Pada Pemerintah Kota Sorong di Papua Barat	Penelitian Kualitatif	Dana Otonomi khusus selalu mengalami peningkatan dan terealisasi secara penuh. Tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana Otonomi khusus akan tetapi besarannya dirasa masih kurang.

2.3 KERANGKA PEMIKIRAN

Berikut ini adalah gambaran mengenai kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

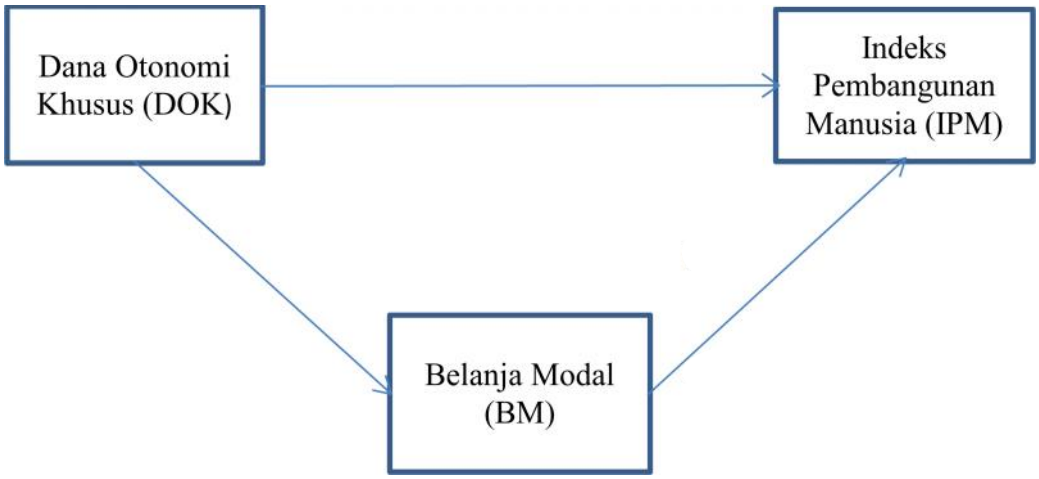

2.4 PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.4.1 Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Penelitian Saputra (2014) di Provinsi Papua Barat menunjukkan bahwa dana otonomi khusus mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap IPM, dimana peningkatan dana otonomi khusus beriringan dengan peningkatan IPM. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yan gdapat dirumuskan adalah:

Ha-$_1$: Dana Otonomi Khusus berpengaruh positif terhadap IPM

2.4.2 Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Modal

Belanja modal sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Dana otonomi khusus ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Penelitian Hartati (2016) di Kabupaten/Kota di Aceh menunjukkan pengaruh yang positif dimana dana otonomi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

Ha-$_2$: Dana Otonomi Khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal

2.4.3 Pengaruh Belanja Modal terhadap IPM

Pengeluaran pemerintah dalam bentuk alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Lebih lanjut, kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat diwujudkan melalui penyediaan sarana publik yang baik. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan melalui penyediaan sarana publik tersebut pada akhirnya akan meningkatkan IPM (Sumardjoko, 2014). Penelitian Zasriati (2015) pada Pemerintah Provinsi Jambi menunjukkan bahwa belanja modal memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan IPM di Provinsi Jambi. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

Ha_{-3}: Belanja modal berpengaruh positif terhadap IPM

2.4.4 Pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap IPM melalui Balanja Modal

Sebagaimana diamanatkan dalam UU nomor 21 tahun 2001, pemberian dana otonomi khusus dititikberatkan pada pembiayaan sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan infrastruktur. Pembiayaan pada sektor-sektor tersebut dapat berupa pengeluaran pemerintah daerah melalui belanja modal guna memberikan fasilitas yang layak pakai bagi masyarakat Provinsi Papua Barat. Penelitian Hartati (2016) di Kabupaten/Kota di Aceh menunjukkan hasil yang berlawanan dimana dana otonomi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

Ha_{-4}: Dana otonomi khusus berpengaruh positif terhadap IPM melalui belanja modal

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitain kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan cara mengukur variabel yang berupa angka-angka dan melalui analisis data dengan prosedur ketentuan statistik. Penelitian ini akan menjelaskan seberapa besar pengaruh dana otsus terhadap perkembangan IPM melalu belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat tahun 2012-2015.

3.2 JENIS DAN SUMBER DATA

Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, seperti mengutip dari buku-buku, literatur, bacaan ilmiah, dan sebagainya yang merupakan relevansi dengan tema penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data panel yang merupakan gabungan dari *Time Series* dan *Cross Section*. Data *cross section* yang digunakan adalah data dari 13 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua Barat sementara data *time series* yaitu rentang waktu data yang diteliti antara tahun 2012-2015.

Sumber data penelitian ini berupa Indeks Pembangunan Manusia diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik pada https://www.bps.go.id/, dan data mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Barat diperoleh dari arsip data BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat.

3.3 POPULASI DAN SAMPEL

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh kota/kabupaten di Provinsi Papua Barat, yang berjumlah 13 kota/kabupaten, terdiri dari 1 kota dan 12 kabupaten. Penelitain ini memiliki rentang waktu 4 tahun yaitu mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Dengan demikian jumlah amatan yang diteliti sebanyak 52 populasi. Dalam penelitian ini penentuan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh.

3.4 MODEL PENELITIAN

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi, yaitu metode yang berkenaan dengan studi ketergantungan satu variabel, variabel dependen, pada satu atau lebih variabel lain, variable independen atau explanatory variables, dengan maksud menaksir dan atau meramalkan nilai rata-rata hitung (mean) atau rata-rata (populasi) variabel dependen, dipandang dari segi nilai yang diketahui atau tetap (dalam pengambilan sampel yang berulang) berupa variabel independen (Gujarati, 2010). Analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada akan digunakan model regresi data panel.

Penelitian ini menggunakan IPM sebagai variabel dependen. Variabel independennya yaitu dana otonomi khusus, sementara belanja modal sebagai variabel intervening (mediasi). Adapun model umumnya adalah sebagai berikut:

Struktur I : $IPM_{(1)i,t} = \alpha_2+\beta_2\ DOK_{i,t}+\varepsilon_2$

Struktur II : $BM_{i,t} = \alpha_1+\beta_1\ DOK_{i,t}+\varepsilon_1$

Struktur III : $IPM_{(2)i,t} = \alpha_3+\beta_3\ DOK_{i,t}+\gamma_3\ BM_{i,t}+\varepsilon_3$

dimana:

$IPM_{i,t}$ = IPM pada kabupaten/kota i dan tahun t+1

$DOK_{i,t}$ = Dana otonomi khusus pada kabupaten/kota i dan tahun t+1

$BM_{i,t}$ = belanja modal pada kabupaten/kota i dan tahun t+1

α = konstanta regresi

β, γ = koefien regresi

ε = error term

3.5 DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

3.5.1 VARIABEL DEPENDEN

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Untuk mengukur sejauh mana pengaruh dana otonomi khusus terhadap pertumbuhan IPM di Papua Barat digunakan data IPM pada tahun berikutnya setelah penerimaan dana otonomi khusus. Dengan kata lain, untuk penerimaan dana otonomi khusus pada pemerintah kabupaten/kota tahun 2012, digunakan data IPM pada tahun 2013. Hal ini disebabkan oleh karena dana otonomi khusus tidak berpengaruh terhadap IPM pada tahun yang bersangkutan. Data IPM kabupaten/kota di Papua Barat diperoleh dari situs website Badan Pusat Statistik pada https://www.bps.go.id/. Pertumbuhan IPM diukur dengan rumus:

$$\text{IPM} = \frac{(IPM_{t+1} - IPM_t)}{IPM_t} \, x \, 100\%$$

3.5.2 VARIABEL INDEPENDEN

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah dana otonomi khusus (DOK). Data mengenai dana otonomi khusus pada penelitian ini diambil dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Papua Barat pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Dana otonomi khusus dalam penelitian ini dipresentasikan dengan rasio realisasi dana otonomi khusus terhadap total anggaran dana otonomi khusus. Rasio realisasi dana otonomi khusus dihitung dengan:

$$\text{DOK} = \frac{\text{realisasi DOK}}{\text{total anggaran DOK}}\ x\ 100\%$$

3.5.3 VARIABEL INTERVENING

Variabel intervening dalam penelitian ini adalah belanja modal (BM). Data mengenai belanja modal pada penelitian ini diambil dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Papua Barat pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Belanja modal dalam penelitian ini direpresentasikan dengan rasio belanja modal terhadap total belanja daerah. Rasio realisasi belanja modal dihitung dengan:

$$\text{BM} = \frac{\text{total realisasi BM}}{\text{total realisasi belanja pemerintah daerah}}\ x\ 100\%$$

3.6 TEKNIK ANALISIS DATA

Pengolahan data yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah metode analisis data dari hal-hal yang berhubungan dengan angka, dan menggunakan rumus-rumus serta teknik perhitungan yang digunakan untuk menganalisis masalah-masalah yang sedang diteliti. Data diolah dengan bantuan *Eviews9*.

Untuk mendapatkan kesimpulan yang paling baik, dilakukan beberapa tahap prosedur pengolahan data. Data panel menggunakan data yang lebih kompleks dengan jumlah observasi yang rata-rata lebih banyak dibanding *cross section* dan *time series* sehingga diperlukan teknik khusus dalam melakukan pengolahan. Prosedur-prosedur pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Estimasi regresi data panel dengan metode *common effect, fixed effect* dan *random effect*;
2. Uji signifikansi model *common, fixed* dan *random effect;*
3. Menentukan model terbaik terhadap data observasi yang dimiliki;
4. Melakukan uji asumsi klasik (untuk model *common* dan *fixed effect*);
5. Uji statistik dengan regresi, uji t-Parsial dan uji F-Simultan;
6. Uji hipotesis intervening.

3.6.1 PENDEKATAN MODEL REGRESI DATA PANEL

Teknik analisis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan alat uji statistik *Eviews9*. Data panel merupakan gabungan antara data silang (*cross section*) dengan data runtut waktu (*time*

series). Dalam pembahasan teknik estimasi model regresi data panel, ada tiga teknik yang dapat digunakan, yaitu:

1) Model dengan metode OLS (*common effect model*)

2) Model *Fixed effect*

3) Model *Random effect*

3.6.2 PEMILIHAN MODEL

Pertama yang harus dilakukan adalah melakukan uji untuk memilih metode mana yang terbaik diantara ketiga metode tersebut antara lain dilakukan dengan uji Chow, uji Hausman dan Uji *Lagrange Multiplier*. Uji Chow dilakukan untuk menguji antara metode *common effect* dan *fixed effect*, sedangkan uji Hausman dilakukan untuk menguji apakah data dianalisis dengan menggunakan *fixed effect* atau *random effect*, dan Uji *Lagrange Multiplier* dilakukan untuk memilih antara model OLS dan model *random effect.* Pengujian tersebut dilakukan dengan *Eviews9*.

a. UJI CHOW

Dalam melakukan uji Chow, data diregresikan dengan menggunakan common effect dan fixed effect terlebih dahulu kemudian dibuat hipotesis untuk diuji. Hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:

Ho: metode common effect (model pool)

Ha: metode fixed effects

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan uji Chow adalah

sebagai berikut:

1. Jika nilai *probability* F≥ 0,05 artinya Ho diterima; maka model yang dipilih adalah model *common effect*.
2. Jika nilai *probability* F < 0,05 artinya Ho ditolak; maka modal yang dipilih adalah model *fixed effect*, dan dilanjutkan dengan uji *Hausman* untuk memilih apakah menggunakan metode *fixed effect* atau metode *random effect*.

Namun, uji Hausman tidak perlu dilakukan apabila hasil Uji Chow menunjukkan bahwa Ho diterima, atau dengan kata lain menyimpulkan bahwa model yang paling tepat digunakan dalam persamaan regresi adalah model *common effect*.

b. UJI HAUSMAN

Selanjutnya untuk melakukan Hausman Test, data juga diregresikan dengan metode *random effect*, kemudian dibandingkan antara *fixed effect* dan *random effect* dengan membuat hipotesis:

Ho: Model *Random effect*

Ha: Model *fixed effect*,

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan uji Hausman adalah sebagai berikut:

1. Jika Nilai p*robability Chi-Square* ≥ 0,05, maka Ho diterima, yang artinya model *random effect*.
2. Jika Nilai *probability Chi-Square* < 0,05, maka Ho diterima, yang artinya model *fixed effect*.

c. UJI *LANGRANGE MULTIPLIER* (LM)

Uji *Lagrange Multiplier* (LM) dilakukan untuk mengetahui apakah model *Random Effect* lebih baik dari model *Common Effect*. Uji Signifikansi *Random Effect* ini dikembangkan oleh *Breusch-Pagan*. Pengujian didasarkan pada nilai residual dari metode *Common Effect*.

Uji LM ini didasarkan pada distribusi *Chi-Squares* dengan derajat kebebasan (*df*) sebesar jumlah variabel independen. Hipotesis yang digunakan adalah :

H_0 : Model mengikuti *common effect*

H_a : Model mengikuti *random effect*

Apabila nilai LM hitung lebih besar dari nilai kritis *Chi-Squares* maka hipotesis nul ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Random Effect*. Dan sebaliknya, apabila nilai LM hitung lebih kecil dari nilai kritis *Chi-Squares* maka hipotesis nul diterima yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Common Effect*. Atau dapat dilakukan dengan melihat nilai *probability Cross-section random*. Apabila nilainya berada di atas 0,05 atau tidak signifikan, maka H0 diterima dan jika berada dibawah 0,05 atau signifikan maka H0 ditolak dan H1 diterima.

3.7 ANALISIS DATA

3.7.1 ANALISIS DESKRIPTIF

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk melihat profil dari data penelitian berupa variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini

variabel yang digunakan adalah dana otonomi khusus, belanja modal dan IPM. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai minimum, nilai maksimum, *mean*, dan standar deviasi. *Mean* digunakan untuk memperkirakan besar rata-rata populasi yang diperkirakan dari sampel. Standar deviasi digunakan untuk menilai dispersi rata-rata dari sampel. Maksimum-minimum digunakan untuk melihat nilai minimum dan maksimum dari populasi. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat.

3.7.2 UJI ASUMSI KLASIK

Pengujian asumsi klasik ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa di dalam model regresi yang digunakan tidak terdapat multikolonieritas dan heteroskedastisitas serta untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan berdistribusi normal (Ghozali, 2016).

Regresi data panel memberikan alternatif model yaitu *Common Effect, Fixed Effect* dan *Random Effect Model*. Model *Common Effect* dan *Fixed Effect* menggunakan pendekatan *Ordinary Least Squared* (OLS) dalam teknik estimasinya, sedangkan *Random Effect* menggunakan *Generalized Least Squares* (GLS) sebagai teknik estimasinya. Perlu atau tidaknya pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini tergantung pada hasil pemilihan metode estimasi. Apabila berdasarkan pemilihan metode estimasi yang sesuai untuk persamaan regresi adalah *random effect*, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik. Sebaliknya,

apabila persamaan regresi lebih cocok menggunakan *common effect* atau *fixed effet* (OLS) maka perlu dilakukan uji asumsi klasik.

3.7.2.1 UJI NORMALITAS

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen, keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam software *Eviews9*, normalitas sebuah data dapat diketahui salah satunya dengan membandingkan nilai *Jarque-Bera* (JB) dan nilai *Chi Square* tabel. Uji JB didapat dari histogram normality yang akan kita bahas dibawah ini.

Hipotesis yang digunakan adalah:

H_0 : Data berdistribusi normal

H_1 : Data tidak berdistribusi normal

Jika hasil dari JB hitung > Chi Square tabel, maka H_0 ditolak

Jika hasil dari JB hitung < Chi Square tabel, maka H_0 diterima

3.7.2.2 UJI MULTIKOLENIEARITAS

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Deteksi multikolinieritas dilakukan dengan cara:

1. Korelasi antar variabel (*pairwise correlations*) dimana apabila kurang dari 0,8 maka tidak terdapat multikolinearitas dan sebaliknya apabila hubungan variabel diatas 0,8 maka terdapat multikolinearitas (Gujarati, 2010).
2. Nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan kriteria apabila nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan VIF semua variabel independen lebih kecil dari 10,00 maka tidak terjadi multikolinearitas (Gujarati, 2010).

3.7.2.3 UJI HETEROKEDASTISITAS

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan kepengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Salah satu uji statistik yang lazim dipergunakan untuk mendeteksi adanya Heteroskedastisits pada suatu model adalah uji *Glejser*. Uji *Glejser* dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya (ABS_RES). Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

3.7.2.4 UJI AUTOKORELASI

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antar anggota serangkaian observasi yang diurutkan, menurut waktu (data *time series*) atau ruang (data *cross section*). Pengujian autokorelasi digunakan untuk

mengetahui apakah terjadi korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2016). Konsekuensi dari adanya autokorelasi dalam suatu model regresi adalah varians sampel tidak dapat menggambarkan varians populasinya. Untuk menguji adanya autokorelasi dapat dideteksi dengan uji *Durbin-Watson test*. Pengujian yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengujian pada nilai *Durbin-Watson* (D-W) untuk mendeteksi adanya korelasi dalam setiap model dengan ketentuan sebagai berikut (dengan *level of significant* yang digunakan dalam penelitian adalah 5%):

1. DW bernilai dibawah -2 berarti terjadi autokorelasi positif

2. DW berada diantara -2 dan +2 berarti tidak terjadi autokorelasi

3. DW bernilai diatas +2 berarti terjadi autokorelasi negatif

3.8 ANALISIS REGRESI (UJI HIPOTESIS)

Setelah pemilihan model, kemudian dilanjutkan dengan analisis regresi. Analisis regresi memiliki tujuan untuk mengestimasi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel terikat berdasarkan variabel bebas yang diketahui. Selain itu, analisis regresi juga berfungsi mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel serta menunjukkan arah hubungan tersebut.

Analisis regresi dengan Uji Statistika F dan Uji Statistika t berguna untuk menguji tingkat signifikansi. Semakin tinggi tingkat signifikansi, semakin cukup bukti untuk menyatakan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh nyata terhadap variabel terikat.

3.8.1 UJI VARIABEL INTERVENING

Analisis variabel intervening pada penelitian ini dilakukan dengan metode *causal step* berdasarkan ketentuan dari Baron dan Kenny (1986) yaitu dengan metode perbedaan koefisien yang menggunakan pemeriksaan dengan melakukan analisis dengan dan tanpa melibatkan variabel intervening.

Metode pemeriksaan variabel intervening dengan pendekatan perbedaan koefisien dilakukan sebagai berikut: (1) memeriksa pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel dependen pada model dengan melibatkan variabel intervening (2) memeriksa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada model tanpa melibatkan variabel intervening, (3) memeriksa pengaruh variabel independen terhadap variabel intervening, (4) memeriksa pengaruh variabel intervening terhadap variabel dependen.

Jika (3) dan (4) signifikan, serta (1) tidak signifikan, maka belanja modal merupakan variabel intervening sempurna (*complete mediation*). Jika (3) dan (4) signifikan serta (1) juga signifikan, di mana koefisien dari (1) lebih kecil (turun) dari (2) maka belanja modal dikatakan sebagai variabel intervening sebagian (*partial mediation*). Jika (3) dan (4) signifikan serta (1) juga signifikan, di mana koefisien dari (1) hampir sama dengan (2) maka belanja modal dikatakan bukan sebagai variabel intervening. Jika salah satu (3) atau (4) atau keduanya tidak signifikan maka belanja modal bukan sebagai variabel intervening.

3.8.2 KOEFISIEN DETERMINASI (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Nilai R^2 berada diantara nol sampai dengan satu. Semakin mendekati nilai satu maka variabel bebas hampir memberikan semua informasi untuk memprediksi variabel terikat atau merupakan indikator yang menunjukkan semakin kuatnya kemampuan dalam menjelaskan perubahan variabel bebas terhadap variasi variabel terikat. Jika R^2 mendekati nol (0) maka semakin lemah variasi variabel independen menerangkan variabel dependen terbatas.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari penerimaan dana otonomi khusus terhadap pertumbuhan ipm dengan belanja modal sebagai variabel intervening pada Kabupaten/Kota di wilayah provinsi Papua Barat dengan tahun amatan 2012 sampai dengan 2015. Berdasarkan hasil dan analisis data maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Dana otonomi khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan IPM di Papua Barat.
b. Dana otonomi khusus memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal dengan arah negatif
c. Belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan IPM. Hal ini diduga disebabkan karena porsi belanja modal pemerintah yang tidak terlalu besar, di mana sebagian besar belanja pemerintah dialokasikan untuk belanja pegawai.
d. Belanja modal tidak mengintervening hubungan antara penerimaan dana otonomi khusus dengan pertumbuhan IPM dikarenakan rata-rata belanja modal Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua Barat 2012-2015 hanya

sebesar 32,71%. Rendahnya porsi alokasi belanja modal disebabkan tingginya porsi belanja operasi. Inilah yang mungkin menjadi salah satu penyebab variabel belanja modal tidak mampu menjadi mesin penggerak menuju tercapainya pertumbuhan ekonomi yang optimal meskipun nilai pendapatan daerah dari Pusat berupa dana perimbangan dan dana otonomi khusus yang diterima cukup besar bahkan dengan jumlah yang meningkat setiap tahunnya.

5.2 Implikasi

Implikasi dari hasil penelitian mencakup dua hal, yaitu implikasi teoritis dan praktis. Implikasi teoritis berhubungan dengan kontribusinya bagi perkembangan teori-teori yang sudah ada yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan implikasi praktis berkaitan dengan kontribusi penelitian terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan dana-dana transfer dari Pusat dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan IPM pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.

a. Implikasi Teoritis

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa sesuai teori *Fiscal Federalism* dan teori desentralisasi, pendelegasian wewenang dari Pusat kepada daerah (yang salah satunya dilakukan dalam bentuk transfer dana untuk membiayai kebutuhan daerah) akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, pengaruh tersebut sangat dipengaruhi oleh perilaku pemerintah daerah. Pengaruh positif atau negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, salah satunya ditentukan oleh seberapa efektif kebijakan yang diambil pemerintah daerah dalam mengelola dana-dana yang diterima dari pusat untuk memaksimalkan pelayanan publik di daerahnya masing-masing

terutama dalam mengalokasikan dananya untuk porsi belanja modal. Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan pelayanan publik tersebut dalam memperoleh pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

b. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini memberikan implikasi pada kebijakan khususnya bagi pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat untuk meningkatkan porsi belanja modal dalam anggaran belanja daerahnya sehingga diharapkan dana-dana transfer dari Pusat seperti dana otonomi khusus dapat berkontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi di Papua Barat dan berusaha untuk menekan rasio belanja pegawainya dengan melakukan moratorium pegawai daerah serta meningkatkan kualitas pegawai yang ada sehingga dapat memberikan kinerja yang baik bagi pelayanan publik di daerah. Selain itu, bagi pemerintah Provinsi agar menyusun aturan/kebijakan pengelolaan dana otonomi khusus yang efektif sehingga diharapkan dana otonomi khusus yang diterima Kabupaten/Kota dapat direalisasikan untuk pembangunan secara optimal. Aparat pengawasan pemerintah daerah (BPKP dan Inspektorat) diharapkan dapat meningkatkan peran pengawasannya dalam pengelolaan dana daerah sejak proses penganggaran hingga selesai direalisasikan agar dana yang tersedia tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah, terhindar dari penyimpangan/penyalahgunaan dan memberikan hasil yang maksimal terhadap pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memberi dampak bagi pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah sebagai regulator diharapkan dapat mengeluarkan peraturan sebagai perpanjangan tangan undang-undang otonomi khusus yang mengatur lebih lanjut mengenai pengalokasian belanja dana otonomi khusus.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah memberikan bukti empiris terkait pengaruh dana otonomi khusus terhadap pertumbuhan IPM daerah pada Kabupaten/Kota di provinsi Papua Barat dengan belanja modal sebagai variabel intervening. Namun, dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan antara lain sebagai berikut:

a. Komponen APBD berupa penerimaan dana transfer dari Pusat dalam penelitian ini hanya terbatas pada dana otonomi khusus.
b. Penelitian ini hanya mengambil belanja modal sebagai variabel intervening. Dan variable dependen hanya pertumbuhan IPM. Dapat dikembangan variable dependen dengan pertumbuhan ekonomi di daerah.
c. Objek penelitian terbatas pada Kabupaten/Kota di provinsi Papua Barat dan rentang waktu hanya 4 (empat) tahun.

5.4 Saran

a. Bagi penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain yang berasal dari komponen APBD seperti PAD dan dana penyesuaian, serta menyertakan dana transfer pemerintah Pusat lainnya sehingga diharapkan dapat memberikan model penelitian yang lebih baik;

b. Penelitian selanjutnya sebaiknya mencoba alternatif variabel intervening selain belanja modal seperti belanja pegawai dan/atau penyertaan modal (investasi pemerintah daerah).

c. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel wilayah yang diteliti dengan penggunaan data sekunder yang lebih besar dan perpanjangan rentang tahun pengamatan sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran dan kesimpulan yang lebih komprehensif mengenai pengaruh variabel independen terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Priyo Hari. 2005. "Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten dan Kota Se Jawa Bali)". *Jurnal Studi Pembangunan Kritis*. Universitas Kristen Satyawacana. Salatiga.

Adiputra, dkk. 2015. "Pengaruh PAD, Dana Perimbanga, dan SiLPA terhadap Kualitas Pembangunan Manusia dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. Universitas Pendidikan Ganesha. Bali

Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Penerbit PT BIP (Kelompok Gramedia). Jakarta.

Bahl, R., J. Lihn. 1992. *Urban Public Finance in Developing Countries. Oxford University Press.* Washington DC.

Baron, R. M. and Kenny, D.A. 1986. "The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual Strategic, and Statistical Considerations". *Journal of Personality and Social Psychology*.

Djalil, Rizal. "Kemana Larinya Dana Otsus Papua". *https://www.jeratpapua.org/2014/08/27/kemana-larinya-dana-otsus-papua/*.

Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate denga Program SPSS*. Edisi Kedua Yogyakarta. Penerbit Universitas Diponegoro.

Gujarati, D. 2010. *Ekonometrika Dasar*. Erlangga. Jakarta.

Hartati, Sri, Syukri Abdullah, Mulia Saputra. 2016. "Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Terhadap Belanja Modal serta Dampaknya pada IPM Kabupaten/Kota Aceh". *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syah Kuala*. Volume 5. No 2. Banda Aceh.

Hong, Houqi dan Sadiq Ahmed. (2009). "Government Spending on Public Goods: Evidence on Growth and Poverty". *Economic and Political Weekly*. Vol. 44.

Julitawati, Ebit, Darwanis, Jalaluddin. 2012. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh". *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syah Kuala*. Volume 1. Nomor 1. Banda Aceh.

Kusumastuti, Anes Lilia. 2012. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya pada Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Tapal Kuda Jawa Timur. Universitas Jember. Jember.

Laimeheriwa, Marshall H.A. 2013. Analisis Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus , Dana Alokasi Umum, terhadap Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia (Studi pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Papua). Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.

Maddick, Henry. 1963. *Democracy, Decentralization, and Development.* Bombay: Asia Publishing House.

Mulyana, Budi. 2006. "Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksebilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah". *Jurnal Akuntansi Pemerintah*.

Numan, W. Lawrence. 2016. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Edisi 7. PT Indeks. Jakarta

Rondinelli, A.D., J.R. Nellis, dan G.S. Cheema. 1983. *Decentralization in Developing Countries: A Review of Recent Experience. World Bank Staff Working Papers No 581*. Washington D.C.

Sidik, Machfud. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Saputra, M. Hijrah. 2014. "Pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh". Universitas Syah Kuala. Banda Aceh.

Sumardjoko, Imam. 2014. "Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia Papua dan Papua Barat dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening". *SNA 1 Mataram Lombok*. Universitas Mataram. 24-27.

Syam, Harbi. "IPM di Kota Sorong Naik 76 Persen". 6 September 2017. *http://www.radarsorong.com/read/2015/07/11/38636/IPM-di-Kota-Sorong-Naik-76-Persen*.

Tjandra, W. Riawan. 2006. *Hukum Keuangan Negara*. Penerbit PT Grasindo. Jakarta.

Todaro, Michael P., and Stephen C. Smith. 2006. *Economic Development.* Pearson Addison Wesley. Harlow. Inggris.

Warouw, Shinta, Grace Nangoy, Treesje Runtu. "Analisis Penggunaan Dana Otonomi Khusus pada Pemerintah Kota Sorong di Provinsi Papua Barat". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Volume 16: 1. 2016. Manado.

Zasriati, Masrida. 2015." Analisis Pengaruh Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan EkonomI di Pemerintah Provinsi Jambi". Jambi.

----------, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

----------, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

----------, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

----------, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

----------, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

----------, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusatdan Daerah.

----------, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

----------, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat.